

Pembentukan Koperasi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Konektivitas Penyandang Disabilitas di Indonesia

Diani Sadiawati¹, Rianda Dirkareshza*², Suharyati³, Yudi Nur Supriadi⁴, Sahda Saraswati
Akbar⁵, Aqila Shafiqa Aryaputri⁶

^{1,2,5,6} Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

^{3,4} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

*e-mail: dianisadiawati@upnvj.ac.id¹, *riandadirkareshza@upnvj.ac.id², suharyati@upnvj.ac.id³,
yudinur_supriadi@yahoo.com⁴, 2110611082@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵,
2210611151@mahasiswa.upnvj.ac.id⁶

Abstrak

Pemberdayaan kelompok penyandang disabilitas dalam bidang ekonomi perlu dilakukan guna meningkatkan taraf hidup dan ketahanan ekonomi kelompok penyandang disabilitas. Hal ini sebagai langkah untuk memberikan wadah kepada kelompok penyandang disabilitas dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Maka dari itu diperlukan pembentukan koperasi bagi penyandang disabilitas sebagai wadah bagi kelompok penyandang dalam menjalankan kegiatan ekonomi dan juga sebagai sarana untuk konektivitas penyandang disabilitas. Berdasarkan penjelasan tersebut maka Tim Pengabdian melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan membentuk koperasi perkumpulan penyandang disabilitas yang nantinya koperasi tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan perekonomian dan konektivitas penyandang disabilitas. Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini yaitu tim melakukan dalam 3 (tiga) tahap, yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap monitoring. Hasil dari pengabdian ini yaitu Tim Pengabdian membantu kelompok penyandang disabilitas membentuk badan usaha koperasi dan juga memberikan penyuluhan materi terkait cara pengelolaan koperasi yang baik dan benar. Selain itu Tim Pengabdian juga memberikan best practice kepada peserta terkait dengan pengelolaan koperasi.

Kata Kunci: Koperasi, Penyandang Disabilitas, Ekonomi, Konektivitas

Abstract

Empowering individuals with disabilities in the economic sphere is essential to improve their standard of living and economic resilience. This is a step toward providing a platform for individuals with disabilities to engage in economic activities. Therefore, the formation of cooperatives for people with disabilities is necessary as a medium for them to carry out economic activities and as a means of connectivity among people with disabilities. Based on this explanation, the Community Service Team conducted a community service activity aimed at forming a cooperative for the association of people with disabilities, which can later be used to improve the economy and connectivity of people with disabilities. The method used in this community service activity is that the team carried out the activities in three stages, namely the preparation stage, the implementation stage, and the monitoring stage. The results of this community service are that the Community Service Team assisted the group of people with disabilities in forming a cooperative business entity and also provided training on how to manage a cooperative properly. In addition, the Community Service Team also provided best practices to participants regarding cooperative management.

Keywords: Cooperative, Persons with Disabilities, Economy, Connectivity

1. PENDAHULUAN

Istilah “Penyandang Disabilitas” tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Republik Indonesia, 2016), “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak”. Konsep ini didasari atas upaya mengadopsian

prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention on the Rights for Persons with Disabilities – CRPD* (United Nations, 2006)) dalam hukum positif sekaligus birokrasi pemerintahan di Indonesia.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bappenas (Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2021), sejauh ini tingkat ke bekerjaan penyandang disabilitas (persentase penyandang disabilitas yang bekerja) secara nasional adalah 56,98%. Berdasarkan persentase tersebut didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 45,92%. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, komunitas disabilitas mendapatkan banyak perhatian khususnya dalam sektor perekonomian (Amnesti, 2021). Beberapa bentuk pemberdayaan yang terfokus pada komunitas disabilitas dilakukan untuk meningkatkan produktivitas serta kemandirian penyandang disabilitas di beberapa daerah di Indonesia (Pawalin and others, 2017). Pemberdayaan yang terkhusus pada penyandang disabilitas menunjukkan bahwa perlunya ruang untuk berkumpul dengan tujuan meningkatkan kapabilitas dari masing-masing anggota difabel. Pembatasan ruang lingkup dalam hal ini tercakup daerah maupun paguyuban. Dengan beberapa tantangan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas, secara tidak langsung komunitas yang terbentuk secara organik tentu terjadi. Terbentuknya komunitas disabilitas menjadi ruang untuk bagi para anggotanya untuk meningkatkan potensinya masing-masing, salah satunya dari perspektif ekonomi. Komunitas ini dapat menjadi wadah bagi para penyandang disabilitas untuk membentuk ketahanan ekonomi, yang dapat dibentuk dari dibangunnya koperasi yang terkhusus pada penyandang disabilitas. Lingkungan bisnis yang dinamis, inovasi dan adaptasi terus menerus menjadi kunci untuk menjaga keunggulan kompetitif dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan (Situmorang *et al.*, 2024). Dengan terbentuknya koperasi, para anggota disabilitas bisa mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan dirinya (Rizki and others, 2019), salah satunya keterbatasan modal yang dihadapi Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia Cabang Jakarta. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk menyelesaikan permasalahan permodalan juga dapat memberikan motivasi usaha untuk mendirikan usaha/bisnis sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki para anggotanya serta mendorong kemandirian disabilitas.

Korelasi pengabdian kepada masyarakat mengenai pembentukan koperasi perkumpulan disabilitas bertujuan untuk meningkatkan konektivitas para penyandang disabilitas untuk mendukung *Sustainable Development Goals* (SDGs) (Ahmad, 2023), diantaranya berhubungan dengan *Goals* Pertama dan *Goals* Kesepuluh. Dengan terciptanya hubungan yang saling berkaitan satu sama lain, yaitu penghapusan terhadap kemiskinan maka akan terjadi penurunan tingkat ketidakesetaraan yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, dengan mekanisme pembentukan koperasi bagi perkumpulan penyandang disabilitas untuk menciptakan peningkatan nilai ekonomi maupun konektivitas hubungan antar penyandang disabilitas sebagaimana yang telah digagas oleh Tim Pengabdian maka diketahui bahwa dengan melakukan pembentukan koperasi bagi mereka dapat memberikan peluang ekonomi sehingga menciptakan pengurangan kesenjangan.

Program ini dapat menjadi model pemberdayaan ekonomi masyarakat (Septiandika *et al.*, 2024), terutama bagi kelompok penyandang disabilitas. Pembentukan koperasi ini menjadi sebuah media untuk menciptakan peluang mata pencaharian yang berkelanjutan bagi para penyandang disabilitas yang tergabung dalam anggota koperasi (Sedyadi *et al.*, no date). Di luar hal tersebut, diketahui bahwa peran penting yang dimiliki oleh koperasi sebagai badan usaha dapat meningkatkan akses pada konteks pemberdayaan individu serta mendukung adanya partisipasi terhadap pergerakan perekonomian negara. Walaupun secara eksplisit SDGs tidak menyebutkan pembentukan koperasi bagi penyandang disabilitas, namun dengan hadirnya prinsip

pemberdayaan ekonomi dan pengurangan kesenjangan selaras dengan Goals 1 dan Goals 10. Maka dari itu, dalam konteks pengabdian masyarakat ini dapat dilihat sebagai sarana mendukung adanya agenda SDGs yang luas sehingga menciptakan inklusi ekonomi dan mengurangi adanya tingkat kesenjangan.

Melihat pada hubungan koperasi dan SDGs juga lebih memiliki fokus penekanan pada konteks pengentasan persentase kemiskinan dan pengurangan tingkatan kesenjangan (Iskandar, 2020). Melalui hal itu, adanya penekanan dalam partisipasi ekonomi dan pengurangan kesenjangan maka sejalan dengan adanya tujuan-tujuan yang diamanatkan oleh SDGs. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa walaupun secara tertulis tidak membahas adanya keterkaitan, namun jika melihat pada aspek prinsip koperasi maupun tujuan dari SDGs kedua hal ini memiliki hubungan yang berkesinambungan. Dengan begitu, pembentukan koperasi bagi penyandang disabilitas ini dapat dianggap sebagai sebuah sarana dalam mendukung adanya agenda SDGs untuk mencapai ruang lingkup yang lebih luas dalam mendorong inklusi ekonomi dan mengurangi kesenjangan (Sri Rokhlinasari and Ridwan Widagdo, 2023).

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini melihat adanya permasalahan yang sering dihadapi oleh kalangan penyandang disabilitas yaitu antara lain: pertama, terbatasnya pengetahuan dan informasi terkait pendirian koperasi sebagai sarana meningkatkan perekonomian dan konektivitas yang mendukung penyandang disabilitas. Kedua, kurangnya informasi dan sosialisasi dari instansi pemerintah terkait dengan memiliki badan hukum berbentuk koperasi merupakan kesempatan bagi penyandang disabilitas untuk membuka peluang lebih luas dalam meningkatkan perekonomian (Rizki and others, 2019) dan ketiga, kebutuhan khusus yang dialami kalangan penyandang disabilitas dianggap sebagai hambatan baik dari sisi efektivitas dan efisiensi kerja sehingga sulit untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja formal (Pasaribu, Ekaputri and others, 2023). Sehingga dengan adanya kegiatan pengabdian ini bertujuan agar dapat membantu penyandang disabilitas untuk mengoptimalkan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas untuk berpartisipasi dalam meningkatkan perekonomian dan konektivitas di Indonesia. Melalui penguatan ekonomi seperti ini, penyandang disabilitas dapat menciptakan sumber pendapatan yang berkelanjutan dan menjadi mandiri secara finansial (Sadiawati *et al.*, 2023). Selain itu, koperasi dapat memberikan pelatihan dan program pengembangan keterampilan bagi anggotanya. Dengan demikian, para penyandang disabilitas juga diuntungkan dengan peningkatan keterampilan mereka.

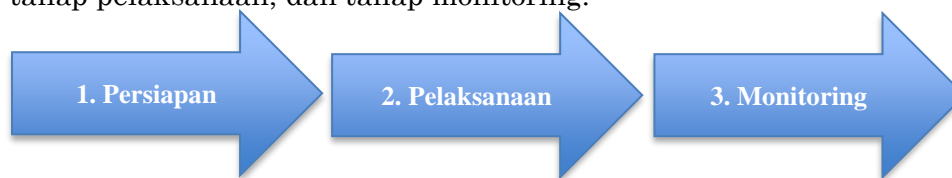
Upaya mencapai peningkatan perekonomian dan konektivitas oleh kalangan penyandang disabilitas dengan koperasi sebagai wadahnya yaitu ditunjukkan oleh meningkatnya pendapatan jika dibandingkan dengan sebelum berkoperasi. Peningkatan pendapatan anggota koperasi harus dapat melalui berbagai cara, salah satu cara adalah dengan memberikan manfaat ekonomi langsung kepada anggota berupa perbedaan harga koperasi yang lebih baik jika dibandingkan dengan harga pesaing koperasi (Indriani, 2022). Cara lainnya yaitu dengan memberikan manfaat ekonomi tidak langsung berupa pemberian sisa hasil usaha koperasi kepada anggota berdasarkan kontribusi masing-masing anggota pada koperasinya (Nazhiroh, 2015). Dalam ruang lingkup pengabdian masyarakat ini, orientasi utama terfokus pada pembentukan koperasi bagi PPDI cabang Jakarta sebagai strategi progresif untuk meningkatkan perekonomian dan konektivitas penyandang disabilitas terutama di Jakarta. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) sendiri merupakan organisasi payung dan beranggotakan berbagai organisasi disabilitas di Indonesia yang didirikan pada tahun 1987. Sasaran utama pengabdian masyarakat ini terfokus pada mobilisasi dan pemberdayaan anggota PPDI terutama di Jakarta. Dukungan anggota PPDI menjadi pondasi penting dalam menjalankan kegiatan ekonomi kolaboratif dengan harapan dapat mengoptimalkan

partisipasi penyandang disabilitas dalam kegiatan ekonomi yang memberikan peluang inklusif.

Selain itu, pengabdian masyarakat ini juga menitikberatkan pada peningkatan pendapatan para anggota koperasi. Dengan menggali potensi usaha bersama, program ini memiliki tujuan untuk menciptakan kondisi di mana para penyandang disabilitas dapat merasakan peningkatan signifikan dalam aspek finansial mereka serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi bagi para penyandang disabilitas. Maka dari itu, perlu adanya perancangan langkah-langkah strategis seperti pelatihan keterampilan, pengembangan usaha bersama, guna memberdayakan anggota PPDI Jakarta secara ekonomi. Rencana ini mencakup upaya konkret untuk menciptakan kerangka kerja yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan inklusif. Langkah-langkah ini tidak hanya diarahkan untuk mempermudah mobilitas penyandang disabilitas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang menyeluruh.

2. METODE

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini yaitu mencakup 3 (tiga) tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap monitoring.



Gambar 1. Tahap Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

Pada tahap persiapan, tim pengabdian masyarakat melakukan survey kepada Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Jakarta mengenai kebutuhan yang diperlukan oleh PPDI Jakarta terkait ekonomi, yaitu terkait koperasi. Tim pengabdian masyarakat juga melakukan pendataan anggota PPDI Jakarta untuk kebutuhan pendaftaran koperasi untuk PPDI Jakarta.

Pada tahap pelaksanaan, tim pengabdian masyarakat melakukan pendaftaran dan pembentukan koperasi untuk PPDI Jakarta. Kemudian tim melakukan kegiatan penyuluhan berupa sosialisasi terkait pengelolaan koperasi kepada PPDI Jakarta. Kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan pada hari Sabtu, 29 Juni 2024 bertempat di Kantor PPDI Jakarta di Duren Sawit, Jakarta Timur. Kegiatan penyuluhan koperasi ini diikuti oleh anggota PPDI Jakarta berjumlah 30 orang.

Kemudian pada tahap monitoring, tim melakukan monitoring terhadap pengelolaan koperasi PPDI Jakarta. Monitoring ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas dari keberadaan koperasi ini untuk para penyandang disabilitas. Tim pengabdian kepada masyarakat juga menggandeng Kementerian Koperasi dan UMKM untuk memberikan pendampingan dan program-program dalam pengelolaan koperasi oleh PPDI Jakarta.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tim Pengabdian Masyarakat dari FH UPN “Veteran” Jakarta melaksanakan pengabdian masyarakat bersama dengan tema “Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia dengan tema Pembentukan Koperasi Perkumpulan Penyandang Disabilitas dalam Meningkatkan Perekonomian Konektivitas Penyandang Disabilitas di Indonesia”. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Kantor PPDI Jakarta di

Duren Sawit Jakarta Timur dan diikuti oleh 30 orang peserta dari Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Jakarta. Kegiatan ini diawali dengan kata sambutan yang diberikan oleh Ketua Tim Pengabdian Masyarakat yaitu Ibu Dr. Diani Sadiawati, S.H., LL.M. Dalam sambutannya, beliau berharap kaum disabilitas dapat menjalankan kegiatan yang produktif dengan cara mendirikan koperasi dan dapat menjalin konektivitas penyandang disabilitas di Indonesia.



Gambar 2. Sambutan oleh Ketua Pengabdian Kepada Masyarakat

Kemudian dilanjutkan pemaparan materi yang disampaikan oleh perwakilan Kementerian Koperasi dan UKM. Materi yang disampaikan ialah mengenai koperasi sebagai badan hukum dan pentingnya pembentukan koperasi. Dalam materi tersebut, pemateri menyampaikan bahwa kaum disabilitas pun dapat menjalankan koperasi guna meningkatkan perekonomian dan konektivitas penyandang disabilitas. Pemateri dari Kementerian Koperasi dan UKM hadir untuk memberikan paparan mendalam mengenai koperasi. Pemateri tidak hanya menjelaskan dasar-dasar hukum koperasi, tetapi juga menyoroti potensi besar koperasi sebagai kendaraan untuk memberdayakan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas. Pemateri menekankan bahwa pembentukan koperasi tidak hanya sekadar urusan legalitas, melainkan juga merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Dengan koperasi, penyandang disabilitas tidak hanya menjadi objek bantuan, tetapi juga menjadi subjek pembangunan yang aktif (Sholihah, 2016). Mereka dapat berkolaborasi, saling mendukung, dan menciptakan peluang ekonomi baru (Triatmanto *et al.*, 2024).

Pemateri menjelaskan secara detail mengenai manfaat nyata yang dapat diperoleh dari pembentukan koperasi, khususnya bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Materi yang disampaikan mencakup berbagai aspek, mulai dari proses pendirian koperasi, pengelolaan keuangan, hingga pemasaran produk. Narasumber juga memberikan contoh-contoh sukses koperasi yang dikelola oleh penyandang disabilitas di berbagai daerah, yang tidak hanya meningkatkan pendapatan mereka, tetapi juga memperkuat jaringan sosial dan meningkatkan kepercayaan diri.

Sejalan dengan tujuan pengabdian masyarakat kami, sesi paparan dari Kementerian Koperasi dan UKM memberikan pencerahan yang sangat berharga. Materi yang disampaikan mengenai potensi koperasi dalam memberdayakan penyandang disabilitas sangat relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Melalui koperasi, diharapkan penyandang disabilitas dapat memperoleh akses yang lebih luas terhadap sumber daya ekonomi, meningkatkan kemandirian, dan berkontribusi aktif dalam pembangunan masyarakat (Bahri, 2019). Paparan ini juga menjadi motivasi bagi kami untuk terus mengembangkan program-program pemberdayaan yang berkelanjutan.



Gambar 3. Pemateri dari Perwakilan Kementerian Koperasi dan UKM

Selanjutnya dilanjutkan dengan sharing session mengenai *best practice* dalam menjalankan koperasi oleh Suharyati, S.E., M.M selaku dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Jakarta. Pemateri membagikan pengalaman berharga dalam mengelola koperasi dan berbagai tantangan yang pernah dihadapi. Salah satu poin penting yang beliau tekankan adalah pentingnya membangun hubungan sosial yang kuat antar anggota koperasi. Pemateri menceritakan bagaimana koperasi tidak hanya menjadi wadah untuk kegiatan ekonomi, tetapi juga menjadi tempat bertemunya berbagai latar belakang dan minat. Melalui koperasi, anggota dapat saling membantu, berbagi pengetahuan, dan menciptakan komunitas yang solid.

Sebagai seorang akademisi yang memiliki pengalaman langsung dalam mengelola koperasi, Suharyati, S.E., M.M., memberikan perspektif yang unik dan menginspirasi. Beliau berbagi kisah sukses koperasi yang pernah beliau bimbing, serta berbagai manfaat konkret yang dapat dirasakan oleh anggota. Selain meningkatkan kesejahteraan ekonomi, koperasi juga dapat menjadi sarana untuk mengembangkan potensi diri, meningkatkan kualitas hidup, dan memperkuat rasa kebersamaan. Peserta sangat antusias mendengarkan pengalaman beliau, terutama terkait bagaimana koperasi dapat menjadi solusi bagi berbagai permasalahan sosial yang ada di masyarakat.



Gambar 4. *Sharing Best Practice* Pengelolaan Koperasi

Setelah mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai potensi koperasi dari narasumber, peserta semakin antusias untuk menggali lebih jauh. Sesi tanya jawab menjadi momen yang dinantikan, terutama bagi mereka yang berminat untuk mendirikan koperasi. Salah satu pertanyaan yang paling banyak muncul adalah terkait sumber pendanaan. Hal ini sejalan dengan tujuan kegiatan pengabdian masyarakat kami, yaitu untuk memberikan solusi konkret bagi permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam mengakses sumber daya ekonomi.



Gambar 5. Sesi Tanya Jawab

Setelahnya kegiatan dilanjutkan dengan pemilihan ketua koperasi yang dilakukan dengan cara voting guna koperasi tersebut dapat berjalan dengan efektif. Berdasarkan hasil voting, seluruh peserta yang hadir pada hari itu setuju menunjuk bapak Leindert Hermeinadi atau biasa dipanggil bapak Didi sekaligus merupakan ketua PPDI Jakarta untuk menjadi ketua koperasi mereka. Lalu dilanjutkan dengan pemberian akta pendirian koperasi kepada kelompok penyandang disabilitas yang diwakili oleh bapak Didi.



Gambar 6. Penyerahan Akta Pendirian Koperasi oleh Ketua Tim Pengabdian kepada Ketua Koperasi Terpilih



Gambar 7. Foto Bersama antara Tim Pengabdian dan Peserta Kegiatan

Setelah dilakukannya kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini, tim pengabdian berharap dengan adanya pengabdian pembentukan koperasi ini, kaum disabilitas dapat menjalankan koperasinya dengan baik dan efektif guna meningkatkan perekonomian dan konektivitas penyandang disabilitas di Indonesia.

4. KESIMPULAN

Pembentukan koperasi bagi penyandang disabilitas merupakan langkah yang sangat positif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan kelompok marginal. Namun, kegiatan ini juga mengungkap sejumlah tantangan, seperti keterbatasan modal, akses pasar, dan pengetahuan manajemen. Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan dukungan berkelanjutan dari berbagai pihak, baik pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun sektor swasta. Selain itu, penting untuk terus melakukan evaluasi dan pengembangan program agar koperasi dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang optimal bagi anggotanya.

Pendirian koperasi bagi penyandang disabilitas merupakan langkah awal yang baik. Namun, keberhasilan koperasi dalam jangka panjang sangat bergantung pada berbagai faktor, seperti kualitas kepemimpinan, partisipasi aktif anggota, serta dukungan lingkungan bisnis yang kondusif. Untuk memastikan keberlanjutan koperasi, perlu dilakukan pendampingan secara berkelanjutan, baik dari segi manajemen maupun pemasaran. Selain itu, penting untuk membangun jejaring kerjasama dengan koperasi lain dan lembaga terkait untuk memperkuat posisi tawar koperasi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM UPN Veteran Jakarta yang telah memberi dukungan financial terhadap pengabdian ini melalui skema hibah internal. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Tim Pengabdi, Peserta dari PPDI Jakarta, Kementerian Koperasi dan UKM, serta seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, M.I.S. (2023) 'BAB 4 KEPENDUDUKAN DAN TENAGA KERJA REVITALISASI PEMBANGUNAN EKONOMI', *Revitalisasi Ekonomi Pembangunan*, p. 37.
- Amnesti, S.K.W. (2021) 'Implementasi pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menuju Purworejo ramah difabel', *Borobudur Law Review*, 3(1), pp. 54–72.
- Bahri, E.S. (2019) *Pemberdayaan Masyarakat Berkelanjutan*. Fam Publishing.
- Indriani, Y. (2022) 'Peran Koperasi Dan UMKM Dalam Pembangunan Ekonomi Inklusif',

Book Chapter: Pengembangan Kinerja Manajemen Organisasi, Keuangan dan Usaha Koperasi & UMKM, pp. 3–12.

- Iskandar, A.H. (2020) *SDGs desa: percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (2021) *Kajian Disabilitas Tinjauan Peningkatan Akses dan Taraf Hidup Penyandang Disabilitas Indonesia: Aspek Sosioekonomi dan Yuridis*. Jakarta.
- Nazhiroh, U.R. (2015) 'HUBUNGAN ANTARA PEMBERIAN KREDIT DENGAN SISA HASIL USAHA PADA KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPR)' 'MARGA JAYA "DI DESA DOPLANG KABUPATEN BLORA', *EQUILIBRIUM: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Pembelajarannya*, 3(1).
- Pasaribu, E., Ekaputri, R.A. and others (2023) 'Pemanfaatan Marketplace dan Digital Marketing Pada Usaha Himpunan Wanita Penyandang Disabilitas Kota Bengkulu', *Madani: Indonesian Journal of Civil Society*, 5(1), pp. 83–89.
- Pawalin, O. and others (2017) 'Peran Dinas Sosial Kota Metro Dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas'.
- Republik Indonesia (2016) *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas*.
- Rizki, M. and others (2019) *Peluang Kerja Disabilitas Menurut UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Koperasi Serba Usaha Huwaiza di Kota Depok Jawa Barat)*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sadiawati, D. *et al.* (2023) 'PENINGKATAN PEREKONOMIAN PENYANDANG DISABILITAS MELALUI PENDAFTARAN HAK CIPTA DAN PENDAFTARAN BADAN HUKUM PERORANGAN DALAM Mendukung SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS', *JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 7(4), pp. 3128–3143.
- Sedyadi, G.S.M. *et al.* (no date) 'Memperkuat Peluang Ekonomi Untuk Keluarga PKH: Ringkasan'.
- Septiandika, V. *et al.* (2024) 'Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir Melalui Kewirausahaan Berbasis Potensi Lokal Di Kota Probolinggo', *ABDINE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), pp. 67–75.
- Sholihah, I. (2016) 'Kebijakan Baru: Jaminan Pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas', *Sosio Informa*, 2(2).
- Situmorang, T.P. *et al.* (2024) 'Peningkatan Kinerja Bisnis Usaha Sub Sektor Kriya Kampung Raja Preliu Melalui Literasi Keuangan, Kewirausahaan Dan Adaptasi Teknologi', *ABDINE: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 4(1), pp. 90–96.
- Sri Rokhlinasari, S.R. and Ridwan Widagdo, R.W. (2023) 'Zakat, Keuangan Inklusif, dan Instrumen Keuangan dalam Mewujudkan SDGS, dan Maqashid Syariah'. Cv Elsi Pro.
- Triatmanto, B. *et al.* (2024) *Model Pemberdayaan Masyarakat Holistik: Berorientasi Potensi Lokal*. Uwais Inspirasi Indonesia.
- United Nations (2006) *Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas (Convention on the Rights for Persons with Disabilities - CRPD)*.